



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 164 /KUM/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR
100.3.3.2/28/KUM/ 2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Tabalong Nomor B-30/BKPSDM/MPKA/800.1.3.1/IV/2026 tentang Penetapan Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Kelua, Surat Usulan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Nomor B.127/DPUPR/800/03/2026 tentang Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong, serta Surat Usulan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Nomor B.283/Disporapar/000/03/2026 tentang Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong, maka untuk kepentingan tugas-tugas dinas dipandang perlu untuk menunjuk pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kelua, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 100.3.3.2/28/KUM/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

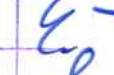
Menetapkan :

- KESATU** : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 100.3.3.2/28/KUM/2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 100.3.3.2/125/KUM/2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 100.3.3.2/28/KUM/2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2026, diubah sebagai berikut:
- Ketentuan dalam Lampiran Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 19 pada kolom 4, serta Nomor Urut 32 pada kolom 3 diubah sehingga Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 19 pada kolom 4, serta Nomor Urut 32 pada kolom 3 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 1 April 2026

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru.
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung di Tanjung.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/164 /KUM/2026
TANGGAL 1 April 2026

DAFTAR PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA SKPD	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN			KETERANGAN
		PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA	PENERIMAAN	
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	Hj. HAMIDA MUNAWARAH, ST, MT NIP. 19670518 199803 2 004 Sekretaris Daerah	MAHFUD NASRUDIN, S.Ak NIP.19850622 201001 1 021 Staf Fungsional Sekretariat Daerah	RITA HERLINA, S.Ak NIP.19810203 201001 2 017 Staf Fungsional Sekretariat Daerah	
2	Sekretariat DPRD	ADY FAZAR, S.H., S.Sos, M.H, Kp NIP.19781110 200112 1 003 Sekretaris DPRD	IRHAMSYAH, A.Md NIP. 197904112 200904 1 002 Staf Fungsional Sekretariat DPRD		
3	Inspektorat Daerah	DIYANTO, SE, MT NIP.19711013 200501 1 005 Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong	SUMIATI NIP. 19801130 200712 2 006 Staf Fungsional pada Inspektorat Daerah		
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si NIP. 19720306 199203 1 004 Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	AHMAD REDHANI, S.Ak NIP.19810323 201001 1 019 Staf Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	ANDRI FATMAWATI, S.AP NIP. 19840425 201001 2 024 Staf Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
5	Dinas Kesehatan	H. AHMAD BAIHAKI, S.Kep., M.M. NIP.19730928 199303 1 005 Plt. Kepala Dinas Kesehatan	HERBANITA PINONDANG SITINJAK, S.Kep NIP.19890518 201101 2 007 Staf Fungsional Dinas Kesehatan	NAZARIAH HASMI, A.Md.Kep NIP.19950929 201903 2 014 Staf Fungsional Dinas Kesehatan	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	H. WIBAWA AGUNG SUBRATA, ST, MT NIP.19680714 199703 1 004 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	FANY TANDIOPANG, A.Md.Pjk NIP.19970718 202012 2 014 Staf Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	MAHFUD, A.Md NIP.19750106 201001 1 009 Staf Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	H. SLAMET RIYADI, ST NIP.19670815 199603 1 004 Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	HERLINA NIP.19810731 200701 2 006 Staf Fungsional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	AHMAD FAUZI, SH, M.Si NIP.19700716 199803 1 011 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	DEDY RAHMADI NIP.19821207 200501 1 005 Staf Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	H. SYAM'ANI, SP, MP NIP. 19750504 200003 1 012 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	GUSTI NILFA ELFARISIE YUSMAR, A.Md NIP.19820720 200501 2 014 Staf Fungsional Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

1	2	3	4	5	6
10	Dinas Tenaga Kerja	HADY ISMANTO, S.Sos, M.AP NIP. 19760717 199511 1 001 Kepala Dinas Tenaga Kerja	DESSY HERAWATI, SE NIP. 19831225 201101 2 013 Staf Fungsional Dinas Tenaga Kerja	RAMADANNI, S.AP NIP. 19960206 202203 1 001 Staf Fungsional Dinas Tenaga Kerja	
11	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	H. FAHRUL RAJI, S.Pi., M.AP. NIP. 19691111 199703 1 006 Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	AKHMAD JAYADI NIP. 19740518 200701 1 016 Staf Fungsional Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	ANNISA JAINA, A.Md NIP. 19910620 202203 2 001 Staf Fungsional Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
12	Dinas Lingkungan Hidup	ERFIN NIRZA SIREGAR, ST, MM NIP. 19710928 200003 1 003 Kepala Dinas Lingkungan Hidup	NOVIANSYAH, A.Md NIP. 19831115 200801 1 017 Staf Fungsional Dinas Lingkungan Hidup	SELAMET RAMADAN, A.Md.Ak. NIP. 19820210 201001 1 029 Staf Fungsional Dinas Lingkungan Hidup	
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ir. ROWI RAWATIANICE, MT NIP. 19661125 199403 2 003 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	ADFIANI, S.AP NIP. 19891105 202203 2 002 Staf Fungsional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-.-	
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	H. ADITYA PULANUGRAHA, S.STP, M.IP NIP. 19861223 200602 1 001 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	AIS RAHMAD, S.Ak NIP. 19830625 200801 1 012 Staf Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-.-	
15	Dinas Perhubungan	TUMBUR PARULIAN MANALU, S.STP, MT NIP. 19780805 199612 1 002 Kepala Dinas Perhubungan	NOOR HIDAYATULLAH, A.Md.AK NIP. 19810516 200801 1 019 Staf Fungsional Dinas Perhubungan	PADLIYANI, A.Md.Ak NIP. 19840818 200604 1 011 Staf Fungsional Dinas Perhubungan	
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	EDDY SURIYANI, S.Sos, MA NIP. 19741223 199403 1 004 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	M. RAMADHANI, S.Kom NIP. 19980114 202203 1 003 Staf Fungsional Dinas Komunikasi dan Informatika	-.-	
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SOLEH, SP, MP NIP. 19700217 199503 1 002 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	RICI SUPIALILA, SE NIP. 19860815 201001 2 030 Staf Fungsional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Hj. HADARIAH, S.AP NIP. 19780525 201001 2 010 Staf Fungsional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	MUHAMMAD RASYID, S.Sos, MH NIP. 19700305 199002 1 001 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	HAZATUL LAILA, S.A.P NIP. 19790116 200701 2 024 Staf Fungsional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-.-	
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	H. ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si NIP. 19700809 199003 1 003 Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	HIDAYATULLAH, S.Pd NIP. 19751025 200604 1 010 Staf Fungsional Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	FARIDA RINAWATI, S.AP NIP. 19770823 201001 2 003 Staf Fungsional Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hj. NORHAYATI, SE., M.Si NIP. 19690203 199803 2 005 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PITRI HERIAWATI NIP. 19830413 201212 2 002 Staf Fungsional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-.-	

1	2	3	4	5	6
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	ARIANTO, S.IP, M.Si NIP.19680515 199003 1 008 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	MULNGADI, A.Md NIP.19790125 200701 1 014 Staf Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	--	
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dr. HUSIN ANSARI, SE, ME NIP.19800610 200501 1 014 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	ERVANA AISYAH FERNANDA, A.Md.Ak NIP. 19970724 202203 2 001 Staf Fungsional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	ANNISA PARAMITHA PUTRI, S.Ak NIP. 19950809 202504 2 002 Staf Fungsional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
23	Badan Pendapatan Daerah	Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si NIP. 19720306 199203 1 004 Kepala Badan Pendapatan Daerah	MANIMBUL P.S. PAKPAHAN, A.Md.Pnl NIP. 20011024 202302 1 003 Staf Fungsional Badan Pendapatan Daerah	ARIYANTI NIP. 19810323 200701 2 004 Staf Fungsional Badan Pendapatan Daerah	
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	FAUZAN, S.Sos NIP.19790127 199903 1 003 Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	LISDA KARLINA, S.Kom NIP.19981119 202504 2 001 Staf Fungsional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	--	
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	HARIS FAKHROZI, ST, MT NIP.19721024 200501 1 004 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	HERIYADI RUSDI, A.Md NIP.19780921 201001 1 011 Staf Fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah	--	
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Drs. ARBUANSYAH, MA NIP.19730207 199311 1 003 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	M. NOR IFANSYAH, A.Md.Ak NIP. 19810621 200801 1 014 Staf Fungsional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	--	
27	Kecamatan Tanjung	N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP, MA NIP.19880526 200701 1 001 Camat Tanjung	KARTIKA ALFAUZA WATI, A.Md.Ak NIP. 19980421 202012 2 004 Staf Fungsional Kecamatan Tanjung	--	
28	Kecamatan Murung Pudak	H. RONY SAPUTRA, S.STP, MIP NIP.19850918 200312 1 002 Camat Murung Pudak	NUR HALIDA, A.Md NIP. 19961220 202012 2 019 Staf Fungsional Kecamatan Murung Pudak	--	
29	Kecamatan Tanta	Drs. ROFIK AZIDDIN, ME NIP. 19731212 199903 1 009 Camat Tanta	TABERANI NIP. 19730309 200906 1 006 Staf Fungsional Kecamatan Tanta	--	
30	Kecamatan Muara Harus	RUDI NOOR ERWAN, S.Sos, M.Si, Kp NIP.19700914 199503 1 006 Camat Muara Harus	MAHMUDI HAKKI, A.Md.Ak NIP. 19820215 200701 1 005 Staf Fungsional Kecamatan Muara Harus	--	
31	Kecamatan Banua Lawas	ARIANTO, S.STP, M.M NIP.19800104 199810 1 002 Camat Banua Lawas	INTAN PERMATA SARI, A.Md NIP. 19941207 202012 2 026 Staf Fungsional Kecamatan Banua Lawas	--	
32	Kecamatan Kelua	ARIANTO, S.STP, M.M NIP.19800104 199810 1 002 Plt. Camat Kelua	IKBAR NIP. 19790520 200604 1 015 Staf Fungsional Kecamatan Kelua	--	

1	2	3	4	5	6
33	Kecamatan Pugaan	FARITH YUSRIANNUR RIZA, SH, Kp NIP.19720808 200501 1 011 Camat Pugaan	NOVITA SARI, A.Md.Pjk NIP. 19960508 202012 2 021 Staf Fungsional Kecamatan Pugaan	-,-	
34	Kecamatan Jaro	H. MAHMUD RIYADI, S.Sos.Kp NIP.19731209 199403 1 004 Camat Jaro	ERMA FITRIANI, A.Md NIP. 19881030 202012 2 016 Staf Fungsional Kecamatan Jaro	-,-	
35	Kecamatan Muara Uya	AIDY RISYAWAL, S.STP, M.Sos. NIP. 19900502 201010 1 001 Camat Muara Uya	HARTONO NIP. 19751028 200501 1 013 Staf Fungsional Kecamatan Muara Uya	-,-	
36	Kecamatan Haruai	MULYADI, S.Sos, Kp NIP.19690610 200012 1 005 Camat Haruai	AKHMAD SAIDILLAH, A.Md NIP. 19971006 202012 1 005 Staf Fungsional Kecamatan Haruai	-,-	
37	Kecamatan Upau	AGUSTIAN, SE, Kp NIP. 19830809 200501 1 004 Camat Upau	GATOT SUKMANA NIP. 19790615 200701 1 026 Staf Fungsional Kecamatan Upau	-,-	
38	Kecamatan Bintang Ara	JATI AKBAR, S.IP., M.M., Kp NIP. 19770129 200501 1 006 Camat Bintang Ara	FATHURRIYADLAH, A.Md NIP. 19750710 200604 2 031 Staf Fungsional Kecamatan Bintang Ara	-,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUB/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG

MUHAMMAD NOOR RIFANI